



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## KEBIJAKAN PENIADAAN KARANTINA BAGI PPLN: MODAL DAN ANCAMAN PARIWISATA BALI

**Dinar Wahyuni**  
Peneliti Madya  
[dinar.wahyuni@dpr.go.id](mailto:dinar.wahyuni@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Bali merupakan destinasi utama wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, sekitar 60 persen dari total wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu udara, mendarat di bandara Bali.

Munculnya virus Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara Bali. Dampaknya, pada tahun pertama pandemi Covid-19, perekonomian Bali secara makro berkontraksi sebesar 9,33 persen. Angka ini jauh dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontraksi 2,07 persen. Kemudian tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Bali masih negatif, yaitu minus 2,47 persen.

Dalam perkembangannya, Bali termasuk provinsi dengan performa pengendalian pandemi Covid-19 yang cukup baik. Berdasarkan parameter Indeks Pengendalian Covid-19 atau IPC yang dibuat Kompas, selama periode gelombang kedua dan ketiga varian Covid-19, skor IPC Bali mampu dengan cepat mengungguli skor rata-rata nasional. Artinya, situasi pandemi Covid-19 di Bali lebih cepat terkendali dibandingkan dengan banyak provinsi lainnya. Dengan kemampuan pengendalian Covid-19, seharusnya Bali mampu lebih cepat memulihkan pariwisata dibandingkan provinsi lain. Permasalahannya adalah wisatawan mancanegara masih menjadi penentu pariwisata Bali.

Membaiknya kondisi di Bali kemudian diikuti kebijakan peniadaan karantina dan pelayanan *visa on arrival* bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Tujuannya adalah untuk memulihkan pariwisata Bali.

Di satu sisi kebijakan tersebut tepat karena Bali merupakan salah satu daya tarik pariwisata Indonesia di dunia internasional. Di sisi lain, merujuk pada pendapat WHO dan sejumlah ahli epidemiologi, pandemi Covid-19 saat ini masih jauh dari kata usai. Penurunan kasus yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia, disinyalir lebih karena berkurangnya jumlah pengujian kasus baru. Kemunculan varian baru virus Covid-19 masih menjadi ancaman.

## Atensi DPR

Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk memastikan kembali kesiapan pelaku wisata di Bali seiring berlakunya kebijakan peniadaan karantina dan pelayanan *visa on arrival* di Bali.

Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat fasilitas dan layanan kesehatan di Bali.

Komisi X DPR RI perlu memastikan pemerintah melakukan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata Bali. Pelonggaran kebijakan perlu diikuti peningkatan protokol kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Komisi X DPR RI perlu mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara berkala khususnya di Bali. Kesehatan dan keamanan wisatawan dan pelaku wisata tetap menjadi aspek utama dalam pemulihan pariwisata.

### Sumber

Kompas.id, 27 September 2021, 5, 7, dan 13 Maret 2022;  
liputan6.com, 7 Maret 2022.2



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Nidya Waras S.  
Dewi Wuryandani  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.